



RENCANA KERJA TAHUN 2023



**DINAS PERHUBUNGAN
KOTA BATAM**





WALI KOTA BATAM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
PERATURAN WALI KOTA BATAM
NOMOR 99 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS
PERHUBUNGAN KOTA BATAM TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BATAM,

Menimbang : bahwa sesuai ketentuan Pasal 123 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dengan berpedoman pada Peraturan Wali Kota Batam Nomor 74 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Batam Tahun 2023, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kota Batam Tahun 2023;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
 3. Undang-Undang. . .

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 590);

10. Peraturan. . .

10. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2019 Nomor 7);
11. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 108), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2021, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 1);
12. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 74 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Batam Tahun 2023 (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2022 Nomor 942);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS PERHUBUNGAN KOTA BATAM TAHUN 2023.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Batam.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Batam.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
4. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah untuk kurun waktu 1 (satu) tahun.
5. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut RKA-Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB II. . .

BAB II
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

- (1) Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal 1 Januari 2023 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
- (2) Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. BAB I : PENDAHULUAN
 - b. BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
 - c. BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
 - d. BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
 - e. BAB V : PENUTUP
- (3) Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2023 merupakan bagian dari Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 3

Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi:

- a. acuan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah (RKA-PD);
- b. landasan penyusunan KUA dan PPAS untuk menyusun Rancangan APBD Tahun 2023; dan
- c. bahan evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang APBD untuk memastikan APBD telah disusun berlandaskan RKPD.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

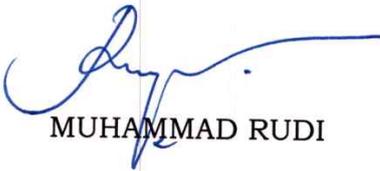
Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 29 Juli 2022

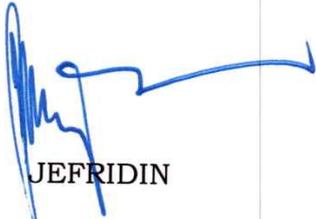
WALI KOTA BATAM



MUHAMMAD RUDI

Diundangkan di Batam
pada tanggal 29 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM



JEFRIDIN

BERITA DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2022 NOMOR 967

BAB V

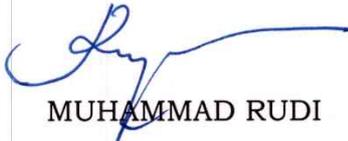
PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kota Batam Tahun 2023 ini merupakan rencana kerja tahunan dalam menunjang tercapainya Visi dan Misi Pemerintah Kota Batam serta target dan sasaran pembangunan yang dioperasionalkan melalui Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Kota Batam Tahun 2023.

Rencana kerja yang dibuat merupakan rekapitulasi dan/atau rangkuman dari rencana kerja serupa yang disusun oleh Bidang, UPTD dan Sekretariat terkait dilingkungan Dinas Perhubungan Kota Batam sesuai tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Batam yang didalam setiap Bidang, UPTD dan Sekretariat Dinas Perhubungan memiliki tugas menyusun program kerja Bidang, UPTD dan Sekretariat, sehingga diperoleh gambaran dan deskripsi yang berkesinambungan dan berstruktur sebagai perwujudan perencanaan partisipatif.

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kota Batam sebenarnya lebih banyak kegiatan yang cenderung sama dari tahun ke tahun, namun banyak juga kegiatan strategis yang tidak dapat dilaksanakan karena ketidakcukupan dana sehingga indikator program tidak dapat tercapai. Akhir kata kami menyadari penyusunan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kota Batam Tahun 2023 ini masih banyak ketidaksempurnaan, oleh karena itu kami mengharapkan masukan dan saran yang konstruktif demi penyempurnaan dan dapat bermanfaat dalam menunjang program kegiatan Dinas Perhubungan Kota Batam kedepannya.

WALI KOTA BATAM


MUHAMMAD RUDI

KATA PENGANTAR

Rencana Kinerja (Renja) Tahun 2023 Dinas Perhubungan Kota Batam disusun sebagai bahan pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan tahun 2023 yang telah ditetapkan prioritas pembangunan yang mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan, sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pembangunan di Kota Batam secara signifikan.

Rencana Kerja (RENJA) ini menjadi acuan seluruh Bidang di lingkungan Dinas Perhubungan Kota Batam sebagai pedoman kerja dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang diembannya dan dapat diselesai dengan baik dan tepat waktu.

Demikian Rencana Kinerja (Renja) Tahun 2023 disusun semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukan dan membutuhkan.

Batam, Juli 2022

**Pih. KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KOTA BATAM**



PEBRIALIN, S.E., M.Si
Pembina Utama Muda

NIP.19630118 199203 1 008

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan.....	9
1.4. Sistematika Penulisan.....	10
BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN 2021 DINAS PERHUBUNGAN KOTA BATAM	
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja dan Capaian Renstra..	12
2.2 Analisa Kinerja Pelayanan.....	17
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi	19
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	22
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat ..	26
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	28
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Perhubungan	30
3.3. Program dan Kegiatan	32
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN	39
BAB V PENUTUP	47

DAFTAR TABEL

	Hal
II.1-1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021 Kota Batam	14
II.2-1 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Kota Batam	18
II.3-1 Faktor Penghambat dan Faktor Pendorong Pelayanan pada Kegiatan Tahun 2021 Dinas Perhubungan	20
II.4-1 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023 Kota Batam	23
II.5-1 Usulan Program dan Kegiatan dari para Pemangku Kepentingan Dinas Perhubungan Kota Batam Tahun 2022	26
III.2-1 Tujuan dan Sasran Kerja Dinas Perhubungan TA 2023 ...	31
III.3-1 Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024 Dinas Perhubungan Kota Batam	36
IV-1 Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Dinas Perhubungan Kota Batam Tahun 2023 (Tabel berasal dari SIPD)	46

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode satu tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Berdasarkan Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah, pasal 13 ayat (2) Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf b memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.

Penyusunan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah merupakan tahapan yang harus dilakukan setelah rancangan renja selesai dan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja Perangkat Daerah yang definitif. Dalam prosesnya, penyusunan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Rencana Strategi (Renstra) RKPD beserta hasil musrenbang tingkat kota. Berdasarkan dari keinginan mewujudkan harapan itu dibutuhkan perencanaan pembangunan yang baik. Perencanaan pembangunan sebagai proses manajemen maupun sebagai suatu kebijakan adalah merupakan tahapan awal dari proses pembangunan yang sangat penting

dalam menentukan arah pembangunan daerah. Mengingat peran dan fungsi Renja Dinas Perhubungan Kota Batam sangat penting bagi Pemerintah Kota Batam, maka proses penyusunannya dilakukan sistematis dan partisipatif oleh seluruh aparatur Dinas Perhubungan Kota Batam dan masyarakat untuk menghasilkan dokumen perencanaan yang tepat dan berkesinambungan.

Peran penting transportasi yang dalam nomenklatur pemerintahan daerah disebut perhubungan, disebutkan disemua undang-undang sektoral Perhubungan yaitu UU. No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan, UU. No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dan UU. No.1 Tahun 2009 tentang Penerbangan. Dalam UU. No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkuta Jalan disebutkan bahwa lalu lintas dan angkutan jalan mempuntai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrase nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Dasar Negara RI Tahun 1945. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai bagian dari system transportasi nasional harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas dan angkutan jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan wilayah.

Tantangan yang dihadapi sektor transportasi saat ini di kota Batam masih terkait konektivitas, akses transportasi yang mudah, aman, nyaman dan lancar ke berbagai tempat merupakan pekerjaan rumah yang harus ditangani hampir disemua daerah. Banyak hambatan-hambatan yang harus ditangani, karena urusan transportasi atau perhubungan harus dilakukan secara baik dengan kerjasama semua pihak yang terlibat dalam urusan penanganan transportasi.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum yang menjadi dasar penyusunan Renja Dinas Perhubungan Kota Batam adalah :

- 1) Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
- 3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 4) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 5) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 6) Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;

- 7) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- 8) Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
- 9) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
- 10) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
- 11) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
- 12) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai pengganti Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),

- sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 13) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 - 14) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 - 15) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 - 16) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 - 17) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
- 18) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 - 19) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42) ;
 - 20) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 6323);
 - 21) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
 - 22) Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 - 23) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 13 Tahun 2014 tentang Rambu Lalu Lintas;
 - 24) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 49 Tahun 2014 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas;
 - 25) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

- 26) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 133 Tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;
- 27) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- 28) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
- 29) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
- 30) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- 31) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
- 32) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 33) Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 330);

- 34) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
- 35) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah
- 36) Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2009 Nomor 2);
- 37) Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 54);
- 38) Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2006 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 37);
- 39) Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 67);
- 40) Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Batam

- Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 87)
- 41) Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 108);
 - 42) Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 3 tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batam Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 119).
 - 43) Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Batam Tahun 2021-2026
 - 44) Peraturan Walikota Batam Nomor 46 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan serta Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan. (Khusus untuk Kecamatan dan Perkimtan)
 - 45) Peraturan Walikota Batam Nomor 74 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Batam Tahun 2023

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1. Maksud

Maksud disusunnya Rencana Kerja adalah untuk merumuskan rencana kerja Dinas Perhubungan Kota Batam untuk periode 1 (satu) tahun sebagai implementasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Batam

1.3.2. Tujuan

Tujuan disusunnya Rencana Kerja adalah sebagai pedoman :

1. pelaksanaan program/kegiatan Dinas tahun 2023

2. monitoring, evaluasi dan pengendalian dalam pelaksanaan program/kegiatan Dinas Perhubungan
3. penyusunan rencana anggaran Dinas Perhubungan

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Berdasarkan Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka sistematika penyusunan Renja Tahun 2023 meliputi:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.2. Tujuan dan sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah

3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN 2021 DINAS PERHUBUNGAN KOTA BATAM

Mengingat Renja Dinas Perhubungan Kota Batam tahun 2021 berada diantara Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batam atau Renstra Dinas Perhubungan Kota Batam Tahun 2016 - 2021 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batam atau Renstra Dinas Perhubungan Kota Batam Tahun 2021 - 2026, maka pelaksanaan evaluasi kinerja pada Renja Tahun 2021 mengacu pada Renstra Dinas Perhubungan Kota Batam Tahun 2021 – 2026. Pelaksanaan evaluasi sebagai sebagai salah satu fungsi peningkatan kualitas kinerja instansi pemerintah, dilaksanakan guna mengetahui program/kegiatan yang tidak memenuhi target, telah memenuhi target ataupun melebihi target kinerja yang direncanakan sesuai target kinerja dalam Renja Dinas Perhubungan Kota Batam tahun 2021 serta dapat mengetahui:

1. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
2. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah; dan
3. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN 2021 DAN CAPAIAN RENCANA STRATEGIS DINAS PERHUBUNGAN KOTA BATAM

Jumlah pagu anggaran Tahun 2021 Dinas Perhubungan Kota Batam yang terdiri dari Belanja Operasi dan Belanja Modal sebesar Rp.52.620.450.358,00 dengan realisasi belanja sebesar Rp.47.011.080.846,08 atau sebesar 89,34%. Dari nilai realisasi tersebut terdapat sisa anggaran yang tidak digunakan sebesar Rp.5.609.369.511 atau 10,66%.

Dalam penganggaran tahun 2021 ini nama program dan kegiatan sudah mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dan

indikator kinerja disusun mengikuti program dan Kegiatan yang baru. Dinas perhubungan melaksanakan 3 Program 14 kegiatan dan 27 sub kegiatan

Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Tahun dapat dilihat pada Tabel II.1-1 sebagai berikut:

Tabel II.1-1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra
Perangkat Daerah Tahun 2021 KOTA BATAM

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target program dan kegiatan (Renja Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
				Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.15.	URUSAN PERHUBUNGAN								
2.15.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Tersedianya administrasi perkantoran yang menunjang tugas pokok dan fungsi perangkat daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.15.01.2.02	KEGIATAN Administrasi Keuangan	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.15.01.2.04	KEGIATAN Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terlaksana	100%	-	-	-	-	-	-
2.15.01.2.06	KEGIATAN Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.15.01.2.07	KEGIATAN Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.15.01.2.08	KEGIATAN Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kebutuhan jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.15.01.2.09	KEGIATAN Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang layak fungsi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.15.01.2.10	KEGIATAN Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Pelayanan BLUD yang difasilitasi sesuai ketentuan	90%	90%	90%	100%	90%	90%	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target program dan kegiatan (Renja Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
				Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.15.02.	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Sarana dan Prasarana Perhubungan yang terbangun	71%	5%	6%	120%	61%	0%	0%
		Jumlah Sarana dan Prasarana Perhubungan yang terbangun	3.698 Unit	2.656 Unit	2656 unit	100%	3.197 Unit	3.197 Unit	86%
2.15.02.2.01	KEGIATAN Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Persentase Dokumen Perencanaan Bidang Perhubungan yang disusun	-	-	-	-	100%	-	-
2.15.02.2.02	KEGIATAN Penyediaan Perengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Perengkapan Jalan yang dibangun setiap tahunnya	100%	100%	100%	100%	100%	-	-
2.15.02.2.06	KEGIATAN Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Ketersediaan APILL di Persimpangan Jalan Kota	75%	51%	54%	106%	63%	-	-
		Jumlah Jukir yang melaksanakan transaksi Non Tunai	100 Orang Jukir	0	0	0%	0	0	0%
2.15.02.2.04	KEGIATAN Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Persentase Titik Parkir yang dikelola	88%	80%	70%	88%	84%	-	-
		Persentase Kendaraan Wajib Uji yang Lulus Uji	75%	70%	65%	92%	73%	-	-
2.15.02.2.05	KEGIATAN Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase Operasional Pelayanan PKB	64%	58%	96%	166%	61%	-	-
2.15.02.2.08	KEGIATAN Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Persentase Pelaksanaan Operasi Terpadu Pengamanan Penertiban Lalu Lintas selama 1 tahun	100%	100%	100%	100%	100%	-	-
		Persentase tingkat pelayanan Operasional Bus Trans Batam	33%	26%	38%	146%	27%	-	-
2.15.02.2.09	KEGIATAN Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan Operasional Bus Trans Batam (Koridor)	90%	90%	80%	89%	90%	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target program dan kegiatan (Renja Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
				Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.15.03.	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Tingkat aksesibilitas masyarakat terhadap transportasi laut	49%	49%	49%	100%	49%	49%	100%
2.15.03.2.06	KEGIATAN Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak Pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota Dan/Atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota	Persentasi pulau yang terlayani oleh transportasi laut	67%	67%	67%	100%	67%	67%	100%
2.15.03.2.12	KEGIATAN Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Persentase prasarana perhubungan laut yang dikelola dalam kondisi baik	100%	100%	100%	100%	100%	-	-

Berdasarkan tabel evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Perhubungan tahun 2021 dan Capaian Renstra, program dan kegiatan yang disajikan hampir semuanya mencapai 100%, ada 2 (dua) kegiatan yang tidak mencapai target yaitu Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir, kegiatan ini mempunyai target kinerja persentase titik parkir yang dikelola, dari 80% target yang ditetapkan hanya tercapai 70% hal ini masih pengaruh dari wabah Covid-19 dimana banyak toko-toko yang tutup dan mobilitas masyarakat juga terbatas sehingga jumlah titik parkir yang dikelola mengalami penurunan. Kegiatan kedua yang tidak mencapai target kinerja yaitu Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dengan target kinerja cakupan pelayanan operasional Bus Trans Batam (Koridor) dengan capaian kinerja 80% dari 90% yang ditargetkan atau hanya mencapai sebesar 89% yaitu dari 11 koridor yang ditargetkan untuk dioperasikan sampai dengan tahun 2021 UPT Pelayanan Jasa Transporasi hanya mampu mengoperasikan 8 Koridor.

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN DINAS PERHUBUNGAN

Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Kota Batam didasarkan pada kajian capaian kinerja pelayanan sesuai indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Tahun 2021-2026 disajikan pada tabel berikut:

TABEL II.2-1
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS PERHUBUNGAN KOTA BATAM

NO	INDIKATOR	SPM / STANDAR NASIONAL	IKK	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH				REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI		CATATAN ANALISIS
				TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	
1	Persentase sarana prasarana perhubungan yang tersedia dan dikelola di perkotaan			73%	75%	84%	89%	73%	41%	75%	89%	
2	Persentase tersedianya angkutan umum yang layak yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan kota			38%	41%	44%	44%	41%	45%	43%	44%	
3	Persentase sarana dan prasarana perhubungan yang tersedia dan dikelola di wilayah hinterland			78%	88%	91%	94%	78%	33%	88%	94%	

2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Batam No. 53 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Dinas Perhubungan, Dinas Perhubungan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang mempunyai tugas pokok memimpin, mengatur, merumuskan, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan mempertanggungjawabkan kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di Bidang perhubungan daerah sesuai dengan kewenangannya

Dalam melaksanakan tugas pokok Kepala Dinas Perhubungan Kota Batam mempunyai fungsi:

1. perumusan kebijakan teknis di Bidang Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Prasarana Perhubungan, dan Angkutan Laut
2. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum Bidang Lalu Lintas, Angkutan jalan, Prasarana Perhubungan, dan Angkutan laut.
3. pembinaan dan pelaksanaan di Bidang Lalu Lintas, Angkutan jalan, Prasarana Perhubungan, dan Angkutan laut.
4. pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan laporan kegiatan Dinas.
5. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan ketentuan peraturan dan perundangan yang berlaku.

Dalam pelaksanaan kegiatan Dinas Perhubungan Kota Batam tahun 2021, terdapat beberapa kendala dan hambatan antara lain adalah :

TABEL II.3-1
FAKTOR PENGHAMBAT dan FAKTOR PENDORONG PELAYANAN
PADA KEGIATAN TAHUN 2021
DINAS PERHUBUNGAN

NO	KEGIATAN OPD	PERMASALAHAN PELAYANAN DINAS PERHUBUNGAN	FAKTOR	
			PENGHAMBAT	PENDORONG
1	KEGIATAN Administrasi Umum Perangkat Daerah	Masih rendahnya ketersediaan kebutuhan operasional administrasi perkantoran	Alokasi Anggaran yang belum optimal untuk kebutuhan operasional kantor	Melakukan Inventarisasi Kebutuhan Administrasi Perkantoran dengan lebih baik lagi
2	KEGIATAN Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Masih minimnya sarana dan prasarana perkantoran	Perencanaan yang belum optimal dan masih rendahnya anggaran untuk pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor	Melakukan inventarisasi Kebutuhan pemeliharaan dan penataan sarana dan prasarana aparatur
3	KEGIATAN Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	banyak sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi kurang baik	Perencanaan yang belum optimal dan masih rendahnya anggaran untuk pemeliharaan sarana dan prasarana kantor	Melakukan inventarisasi Kebutuhan pemeliharaan dan penataan sarana dan prasarana aparatur
4	KEGIATAN Peningkatan Pelayanan BLUD	Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam memanfaatkan pelayanan Bus Trans Batam	belum optimalnya konsep multimoda (Konektivitas antar angkutan masih kurang)	Ketersediaan jumlah Bus yang maksimal
5	KEGIATAN Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Rambu yang terkait dengan kepemilikan aset jalan di kota Batam	Banyaknya ruas jalan yang masih dalam tahap pelebaran/peningkatan	Adanya kewenangan pembangunan sarana dan prasarana Lalu Lintas di Jalan yang merupakan aset Kota Batam
6	KEGIATAN Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalulintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Traffic Light yang belum terintegrasi diseluruh persimpangan di kota Batam	Banyaknya ruas jalan yang masih dalam tahap pelebaran/peningkatan	Optimalisasi kinerja dan fungsi Traffic Light/ATCS
7	KEGIATAN Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam memanfaatkan layanan parkir sebagai bentuk keselamatan lalu lintas bagi pengguna jalan	Masih kurangnya etika dalam memberikan pelayanan, pengawasan, pembinaan dan pendidikan para Juru Parkir sebagai pelayanan kepada masyarakat	Adanya Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Parkir
8	KEGIATAN Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Fasilitas Pengujian Kendaraan Bermotor masih rendah	Rendahnya kesadaran masyarakat dan pemilik kendaraan wajib uji untuk melaksanakan Uji Kir	Pelaksanaan Razia Kendaraan Penumpang dan Angkutan Barang serta dibuka nya pelayanan uji Kir pada hari libur
9	KEGIATAN Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Pelaksanaan Razia yang melibatkan instansi vertikal sehingga harus menyesuaikan waktu pelaksanaan	Masih kurangnya Personil yang memiliki kompetensi atau sertifikat penyidik	Rutin melaksanakan Razia Angkutan Penumpang dan barang guna meningkatkan disiplin dan keselamatan pengguna Jalan
		Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam tertib berlalu lintas	Kurangnya Jumlah Personil dan Sarana (kendaraan operasional) dalam melaksanakan pengawasan	Adanya Forum Lalu Lintas sesuai SK Walikota No. KPTS.50/HK/1/2018 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kota Batam

NO	KEGIATAN OPD	PERMASALAHAN PELAYANAN DINAS PERHUBUNGAN	FAKTOR	
			PENGHAMBAT	PENDORONG
10	KEGIATAN Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam memanfaatkan pelayanan Bus Trans Batam	belum optimalnya konsep multimoda (Konektivitas antar angkutan masih kurang)	Ketersediaan jumlah Bus yang maksimal
		Ketersediaan Bus Sekolah tidak seimbang dengan semakin meningkatnya jumlah pengguna	Kondisi Bus Sekolah yang sudah tidak layak lagi	Peremajaan angkutan Bus Sekolah
11	KEGIATAN Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak Pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota Dan/Atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota	Minimnya ketersediaan Sarana dan prasarana diwilayah hinterland yang tidak sebanding dengan kebutuhan masyarakat	Besarnya biaya operasional Kapal	Besarnya minat masyarakat hinterland dalam penggunaan Kapal Perintis sebagai sarana penyeberangan
12	KEGIATAN Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Terbatasnya DED yang dimiliki	Kurangnya dukungan pihak-pihak yang berkepentingan terutama dalam penyediaan lahan	Kebutuhan konektivitas masyarakat diwilayah hinterland

Isu Strategis yang dihadapi Dinas Perhubungan Kota Batam adalah:

1. Kebutuhan 11 Koridor Trans Batam dan penambahan 130 armada sampai dengan tahun 2021 belum tercapai;
2. Pengoperasian *feder* untuk mendukung *integrated transportation system* belum terlaksana;
3. Belum optimalnya sistem pengelolaan perparkiran;
4. Belum optimalnya pengujian kendaraan terhadap kendaraan wajib uji (kendaraan angkutan penumpang dan barang)
5. Belum optimalnya jumlah sarana dan prasarana Perhubungan (seperti shelter/halte, transfer point, terminal, jembatan penyeberangan orang (JPO), *traffic light*, rambu lalu lintas, rambu pendahulu penunjuk jalan (RPPJ), rambu parkir, papan nama jalan, cansteen, pagar pemisah, guardrail, cemin tikungan, *display info*, *warning light*, marka jalan, marka parkir, pita penggaduh, zona selamat sekolah (ZoSS), zebra cross, dll) untuk meningkatkan keselamatan berlalu lintas;
6. Belum optimalnya konektivitas dan aksesibilitas transportasi ke wilayah kepulauan (*hinterland*);

7. Belum terbentuknya moda transportasi yang modern di kota Batam;
8. Belum optimalnya sarana dan prasarana operasional Dinas Perhubungan Kota Batam;

Dampak dan faktor penghambat dan pendorong terhadap visi misi Walikotayang terkait dengan capaian program dan formulasi penyelesaian dampak, yaitu ;

1. Jika pelaksanaan kegiatan terlambat atau tidak terlaksana akan berpengaruh pada target RPJMD dan mempengaruhi visi dan misi walikota. Hal ini bisa disebabkan rasionalisasi anggaran dan kondisi teknis lapangan
2. Tidak terserapnya aspirasi masyarakat melalui paket-paket pekerjaan dan juga akan mempengaruhi capaian target indikator
3. Belum maksimalnya serapan aspirasi masyarakat dan rencana kerja OPD

Penyelesaian dampak dapat dilakukan dengan peningkatan PAD (Pendapatan Asli Daerah) dan Meningkatkan Kinerja OPD.

2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Review terhadap rancangan awal RKPD disajikan pada Tabel II.4 - 1 berikut ini :

TABEL II.4 - 1
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2023
KOTA BATAM

Nama Perangkat Daerah : DINAS PERHUBUNGAN

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
	PROGRAM DAN KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Juta Rp)	PROGRAM DAN KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Juta Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
2.15.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		Tersedianya administrasi perkantoran yang menunjang tugas pokok dan fungsi perangkat daerah		27.494.091.410,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		Tersedianya administrasi perkantoran yang menunjang tugas pokok dan fungsi perangkat daerah		27.535.896.610,00
2.15.01.2.02	KEGIATAN Administrasi Keuangan	Kota Batam	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi	100%	13.409.387.510,00	KEGIATAN Administrasi Keuangan	Kota Batam	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi	100%	13.409.387.510,00
2.15.01.2.04	KEGIATAN Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Batam	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terlaksana	100%	265.224.000,00	KEGIATAN Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Batam	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terlaksana	100%	265.224.000,00
2.15.01.2.06	KEGIATAN Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Batam	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	259.861.300,00	KEGIATAN Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Batam	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	259.861.300,00
2.15.01.2.07	KEGIATAN Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Batam	Persentase Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi	100%	1.198.126.400,00	KEGIATAN Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Batam	Persentase Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi	100%	1.198.126.400,00
2.15.01.2.08	KEGIATAN Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Batam	Persentase kebutuhan jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	100%	2.717.737.400,00	KEGIATAN Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Batam	Persentase kebutuhan jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	100%	2.717.737.400,00
2.15.01.2.09	KEGIATAN Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Batam	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang layak fungsi	100%	685.560.000,00	KEGIATAN Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Batam	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang layak fungsi	100%	685.560.000,00
2.15.01.2.10	KEGIATAN Peningkatan Pelayanan BLUD	Kota Batam	Persentase Pelayanan BLUD yang difasilitasi sesuai ketentuan	90%	8.958.194.800,00	KEGIATAN Peningkatan Pelayanan BLUD	Kota Batam	Persentase Pelayanan BLUD yang difasilitasi sesuai ketentuan	90%	9.000.000.000,00

NO	RANCANGAN AWAL RKP					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
	PROGRAM DAN KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Juta Rp)	PROGRAM DAN KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Juta Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
2.15.02.	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)		Persentase Sarana dan Prasarana Perhubungan yang terbangun	71%	29.460.332.150,00	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)		Persentase Sarana dan Prasarana Perhubungan yang terbangun	71%	30.375.332.150,00
			Jumlah Sarana dan Prasarana Perhubungan yang terbangun	3.698 Unit					Jumlah Sarana dan Prasarana Perhubungan yang terbangun	
2.15.02.2.01	KEGIATAN Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Kota Batam	Persentase Dokumen Perencanaan Bidang Perhubungan yang disusun	-	-	KEGIATAN Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Kota Batam	Persentase Dokumen Perencanaan Bidang Perhubungan yang disusun	100%	915.000.000,00
2.15.02.2.02	KEGIATAN Penyediaan Perengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Kota Batam	Persentase Perengkapan Jalan yang dibangun setiap tahunnya	100%	4.948.065.500,00	KEGIATAN Penyediaan Perengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Kota Batam	Persentase Perengkapan Jalan yang dibangun setiap tahunnya	100%	4.948.065.500,00
2.15.02.2.05	KEGIATAN Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalulintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Kota Batam	Persentase Ketersediaan APILL di Persimpangan Jalan Kota	75%	7.606.382.300,00	KEGIATAN Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalulintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Kota Batam	Persentase Ketersediaan APILL di Persimpangan Jalan Kota	75%	7.606.382.300,00
			Jumlah Jukir yang melaksanakan transaksi Non Tunai	100 Orang Jukir					Jumlah Jukir yang melaksanakan transaksi Non Tunai	
2.15.02.2.03	KEGIATAN Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Kota Batam	Persentase Titik Parkir yang dikelola	88%	2.164.093.100,00	KEGIATAN Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Kota Batam	Persentase Titik Parkir yang dikelola	88%	2.164.093.100,00
			Persentase Kendaraan Wajib Uji yang Lulus Uji	75%					Persentase Kendaraan Wajib Uji yang Lulus Uji	
2.15.02.2.04	KEGIATAN Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kota Batam	Persentase Operasional Pelayanan PKB	64%	693.239.000,00	KEGIATAN Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kota Batam	Persentase Operasional Pelayanan PKB	64%	693.239.000,00
2.15.02.2.06	KEGIATAN Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Kota Batam	Persentase Pelaksanaan Operasi Terpadu Pengamanan Penertiban Lalu Lintas selama 1 tahun	100%	264.000.000,00	KEGIATAN Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Kota Batam	Persentase Pelaksanaan Operasi Terpadu Pengamanan Penertiban Lalu Lintas selama 1 tahun	100%	264.000.000,00
			Persentase tingkat pelayanan Operasional Bus Trans Batam	33%					Persentase tingkat pelayanan Operasional Bus Trans Batam	
2.15.02.2.07	KEGIATAN Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Batam	Cakupan pelayanan Operasional Bus Trans Batam (Koridor)	90%	13.784.552.250,00	KEGIATAN Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Batam	Cakupan pelayanan Operasional Bus Trans Batam (Koridor)	90%	13.784.552.250,00

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
	PROGRAM DAN KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Juta Rp)	PROGRAM DAN KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Juta Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
2.15.03.	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN		Tingkat aksesibilitas masyarakat terhadap transportasi laut	49%	7.859.623.550,00	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN			49%	11.115.305.750,00
2.15.03.2.06	KEGIATAN Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak Pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota Dan/Atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota	Kota Batam	Persentasi pulau yang terlayani oleh transportasi laut	67%	1.706.129.800,00	KEGIATAN Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak Pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota Dan/Atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota	Kota Batam	Persentasi pulau yang terlayani oleh transportasi laut	67%	1.706.129.800,00
2.15.03.2.12	KEGIATAN Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Kota Batam	Persentase prasarana perhubungan laut yang dikelola dalam kondisi baik	100%	6.153.493.750,00	KEGIATAN Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Kota Batam	Persentase prasarana perhubungan laut yang dikelola dalam kondisi baik	100%	9.409.175.950,00
					64.814.047.110,00					69.026.534.510,00

2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Usulan program/kegiatan dari masyarakat, kelurahan, kecamatan dimulai pada tahap penyelenggaraan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) dan Forum Perangkat Daerah dan input data pada aplikasi SIPD (*Sistem Informasi Pemerintahan Daerah*).

Beberapa usulan yang masuk ke Dinas Perhubungan kota Batam melalui Musrenbang masih berkaitan dengan usulan fasilitas keselamatan jalan dan pembangunan serta rehabilitasi pelabuhan atau dermaga di wilayah hinterland. Namun mengingat Pagu Anggaran Kota Batam yang tersedia terbatas sehingga dari semua usulan masyarakat yang masuk masih harus diverifikasi dan diprioritaskan kembali pada Forum Perangkat Daerah.

Hasil Musrenbang dan Forum Perangkat Daerah tahun 2022 tersebut diharapkan dapat memberikan masukan, usulan dan koreksi dari unsur masyarakat (Kelurahan/kecamatan) yang dapat lebih mempertajam usulan program/kegiatan dibidang Perhubungan.

Usulan Program dan kegiatan dari masyarakat dapat dilihat pada Tabel II.5 - 1, yaitu :

Tabel T-C.32

**TABEL II.5.1
USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU
KEPENTINGAN
DINAS PERHUBUNGAN KOTA BATAM TAHUN 2022**

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN /VOLUME	PAGU DANA
(1)	(2)	(1)	(2)	(1)	(2)
I.	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)		Persentase Sarana dan Prasarana Perhubungan yang terbangun		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Perhubungan yang terbangun		
I.1.	KEGIATAN Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota		Persentase Perlengkapan Jalan yang dibangun setiap tahunnya		
I.1.1.	SUB KEGIATAN : Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Simpang tiga Perum Victoria RW 016, Tanjung Riau, Kecamatan Sekupang	Pembangunan Pagar Besi Pembatas Jalan Simpang Tiga Perum Victoria	150 m'	299.385.000

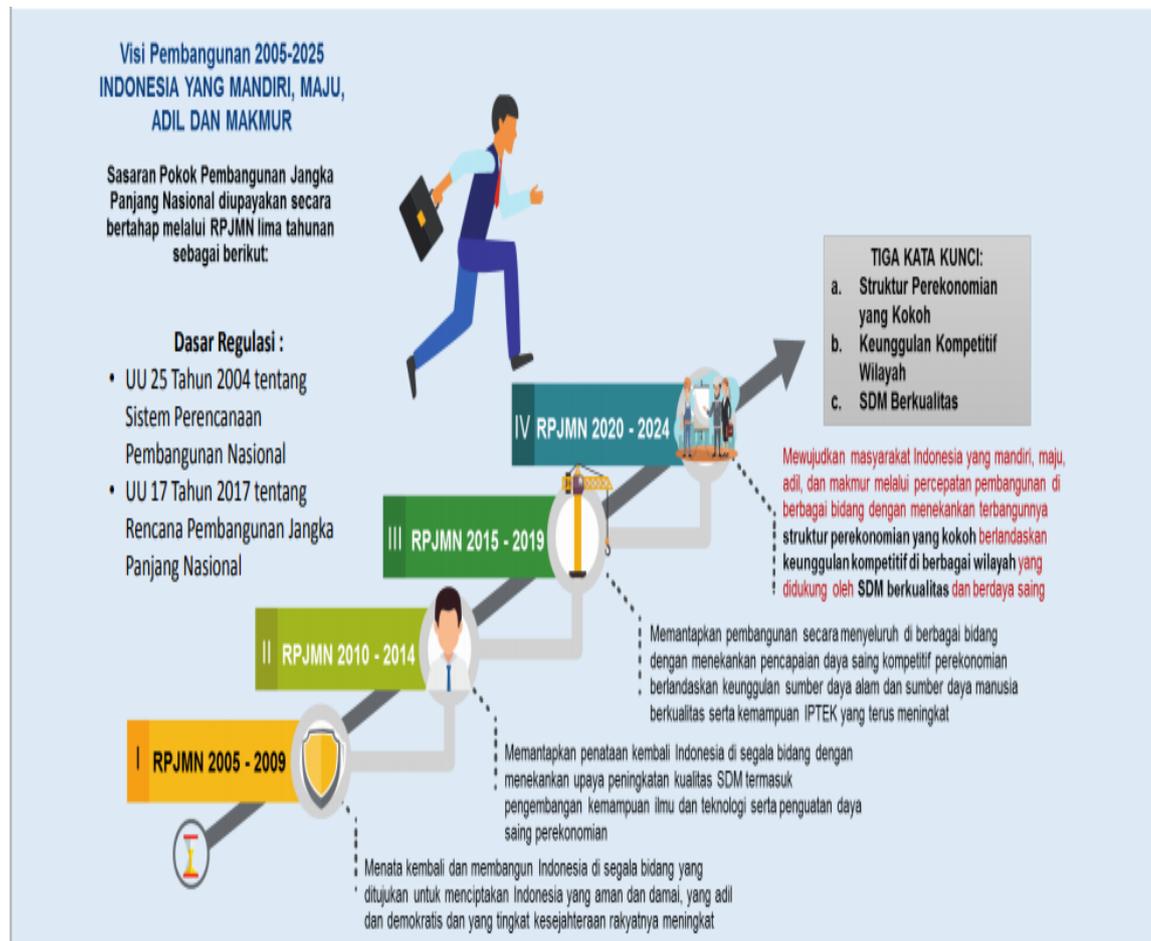
NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN /VOLUME	PAGU DANA
(1)	(2)	(1)	(2)	(1)	(2)
II.	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN		Tingkat aksesibilitas masyarakat terhadap transportasi laut		
II.1.	KEGIATAN Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal		Persentase prasarana perhubungan laut yang dikelola dalam kondisi baik		
II.1.1.	SUB KEGIATAN : Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal	RT.01/RW.01, Kel. Ngenang, Kec. Nongsas	Pembangunan Dermaga Apung / Ponton	20 Unit	1.560.195.621
		RT.01/RW.03, Pulau Kubung, Kel. Ngenang, Kec. Nongsas	Pembangunan Pelantar Beton	160 m ²	1.675.198.080
		RT.04/RW.01, Kel. Ngenang, Kec. Nongsas	Pembangunan Pelantar Beton	600 m ²	6.281.992.800
		Dekat Rumah Samarudin RT.01/RW.02, Pulau Panjang, Kel. Sijantung, Kec. Galang	Pembangunan Pelantar Beton	-	-
		Camping RT.02 RW.02, Kel. Sembulang, Kec. Galang	Pembangunan Pelantar Beton	400 m ²	4.187.995.320
		Pulau Korek, RT.04/RW.01, Kec. Galang	Pembangunan Pelantar Beton	140 m ²	1.465.798.320
		Pulau Jalah RT.03/RW.02, Kel. Pantai Gelam, Kec. Galang	Pembangunan Dermaga Apung / Ponton	32 m ²	1.450.156.608
		RT.01/RW.06, Kel. Setokok, Kec. Bulang	Pembangunan Pelantar Beton	366 m ²	3.832.015.608
		Pulau Seraya RT.05/RW.02, Kel. Batu Legong, Kec. Bulang	Pembangunan Pelantar Beton	80 m ²	837.599.040
		Temoyong, RT.01/RW.01, Kel. Temoyong, Kec. Bulang	Pembangunan Atap Dermaga	200 m ²	346.426.000
		Bulang Lintang, RT.01/RW.01, Kel. Bulang Lintang, Kec. Bulang	Pembangunan Dermaga Apung / Ponton	24 m ²	2.209.167.468
		RT.05/RW.03 Teluk Kangkung, Kel. Pulau Terong, Kec. Belakang Padang	Pembangunan Pelantar Beton	120 m ²	3.769.195.680
		RT.04 / RW.02 Kelurahan Pecong, Kec. Belakang Padang	Pembangunan Pelantar Beton	600 m ²	6.281.992.800
		RT.01 / RW.01, Kel. Pecong, Kec. Belakang Padang	Pembangunan Pelantar Beton	375 m ²	649.548.750
		Labun RT.01/RW.01, Kelurahan Pemping, Kec. Belakang Padang	Pembangunan Ponton dan Pematapan Pelantar Beton	32 m ²	1.475.597.952
		Pulau Gara RT.22/RW.06, Kel. Kasu, Kec. Belakang Padang	Pembangunan Pelantar Beton	500 m ²	5.234.994.000
		Pulau Abang RT.04 RW.01 Kel. Pulau Abang, Kecamatan Galang	Pembangunan Pelantar Beton	1 Unit	3.500.000.000
		Pulau Abang RT.03 RW.01 Kel. Pulau Abang	Pembangunan Dermaga Apung / Ponton	1 Unit	2.500.000.000
II.1.2.	SUB KEGIATAN : Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Pelabuhan Pulau Mubut, Kel. Karas, Kec. Galang	Rehabilitasi dan Penambahan Ruang tunggu Pelabuhan Pulau Mubut	305 m ²	528.299.650
		RT.01/RW.03 Pulau Petong, Kel. Pulau Abang, Kec. Galang	Rehabilitasi Pelantar Beton	111 m ²	202.266.430
		Bulang Lintang, RT.01/RW.01, Kel. Bulang Lintang, Kec. Bulang	Rehab Pelabuhan Beton	211 m ²	2.209.167.468
		Pulau Labu RT.06/RW.03, Kel. Batu Legong, Kec. Galang	Rehabilitasi Pelabuhan Umum + Atap	118 m ²	204.391.340
		Pulau Amat Belanda, RT.03/RW.04, Kel. Sekanak Raya, Kec. Belakang Padang	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Pelabuhan	127 m ²	219.960.510
					50.921.344.445

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Pembangunan nasional merupakan upaya semua komponen bangsa yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan bernegara sebagaimana diamanatkan oleh Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan berdasarkan Pancasila. Pencapaian tujuan ini dilaksanakan secara bertahap, mulai dari jangka panjang, jangka menengah, hingga tahunan. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 berdasarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007, menggariskan Visi Indonesia tahun 2025 yaitu INDONESIA YANG MANDIRI, MAJU, ADIL DAN MAKMUR yang pelaksanaannya dibagi kedalam 4 (empat) tahap pembangunan jangka menengah.



Pembangunan tahun 2022 berada pada tahap jangka menengah yang ke-empat yang arahnya digariskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yaitu MEWUJUDKAN MASYARAKAT INDONESIA YANG MANDIRI, MAJU, ADIL DAN MAKMUR MELALUI PERCEPATAN PEMBANGUNAN DI SEGALA BIDANG DENGAN STRUKTUR PEREKONOMIAN YANG KOKOH BERLANDASKAN KEUNGGULAN KOMPETITIF.

Rencana Strategis Kementerian Perhubungan 2020-2024



Arahan Presiden Terpilih

Pembangunan
Infrastruktur

Pembangunan
SDM

Reformasi
Birokrasi

Mendorong
Investasi

Penggunaan
APBN

Fokus Utama Kementerian Perhubungan



Konektivitas dan
Aksesibilitas



Tingkat
Layanan



Keselamatan
dan Keamanan



Pariwisata



Logistik



3T



IKN Baru

Pendukung



Sumber Daya Manusia



Kebijakan dan Regulasi



Teknologi



Delivery Unit

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENCANA KERJA DINAS PERHUBUNGAN KOTA BATAM TAHUN 2023

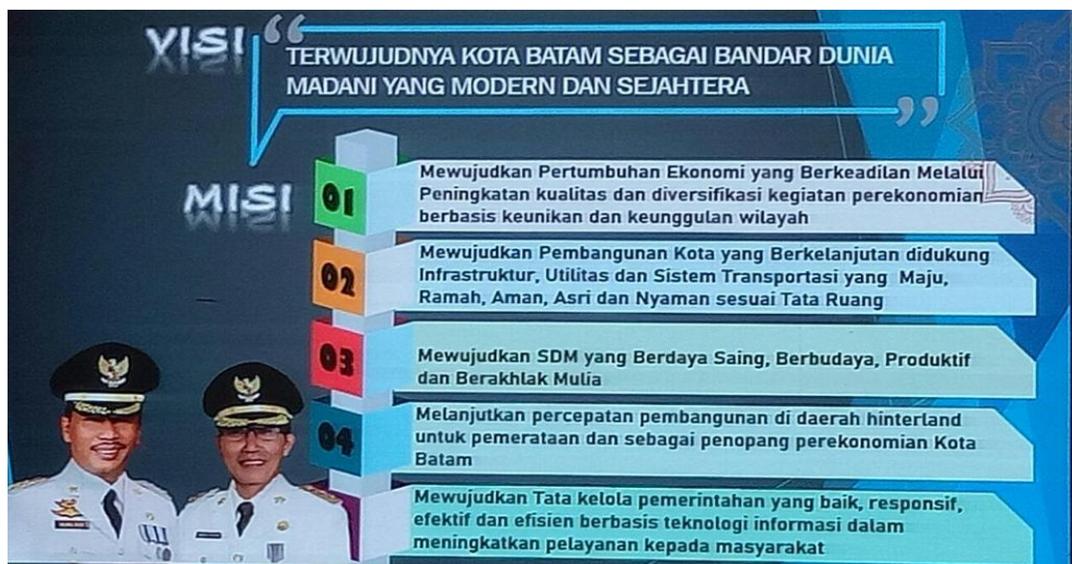
Tujuan dan sasaran Dinas Perhubungan yang telah disusun untuk periode 5 (lima) tahun kedepan tahun 2021-2026 berdasarkan Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih yaitu sebagai berikut:

VISI

TERWUJUDNYA BATAM SEBAGAI BANDAR DUNIA MADANI YANG MODERN DAN SEJAHTERA

MISI

1. Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkeadilan Melalui Peningkatan kualitas dan diversifikasi kegiatan perekonomian berbasis keunikan dan keunggulan wilayah.
2. Mewujudkan Pembangunan Kota yang Berkelanjutan didukung Infrastruktur, Utilitas dan Sistem Transportasi yang Maju, Ramah, Aman, Asri dan Nyaman sesuai Tata Ruang.
3. Mewujudkan SDM yang Berdaya Saing, Berbudaya, Produktif dan Berakhlak Mulia
4. Melanjutkan Percepatan pembangunan di Daerah Hinterland untuk pemerataan dan sebagai penopang perekonomian Kota Batam
5. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Responsif, Efektif dan Efisien berbasis teknologi informasi dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat



Dinas Perhubungan berada dalam misi ke 2 (dua) yaitu *Mewujudkan Pembangunan Kota yang Berkelanjutan didukung Infrastruktur, Utilitas dan Sistem Transportasi yang Maju, Ramah, Aman, Asri dan Nyaman sesuai Tata Ruang* dan misi ke 4 (empat) yaitu *Melanjutkan Percepatan pembangunan di Daerah Hinterland untuk pemerataan dan sebagai penopang perekonomian Kota Batam.*

Tujuan dan sasaran Rencana Kerja Tahun 2022 merupakan tujuan dan sasaran Renstra Dinas Perhubungan untuk Tahun 2021-2026 yang telah disusun seperti Tabel berikut ini :

Tabel III.2 – 1
TUJUAN DAN SASARAN KERJA DINAS PERHUBUNGAN TA 2023

MISI WALIKOTA	TUJUAN RPJMD	SASARAN RPJMD	TUJUAN DINAS PERHUBUNGAN	SASARAN DINAS PERHUBUNGAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	TARGET 2023
Mewujudkan Pembangunan Kota yang Berkelanjutan didukung infrastruktur, Utilitas dan Sistem Transportasi yang Maju, Ramah, Aman, Asri dan Nyaman sesuai Tata Ruang	Terwujudnya infrastruktur kota yang berkualitas dan serasi dengan tata ruang Kota Batam serta berwawasan lingkungan dan memperhatikan aspek kebencanaan	Tersedianya infrastruktur perkotaan yang aman, nyaman dan terpadu serta kawasan permukiman yang layak huni	Meningkatkan Pembangunan Sarana dan Prasarana Transportasi yang Maju, Ramah, Aman dan Nyaman		Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Perhubungan Perkotaan	64%
				Tersedianya sarana dan prasarana transportasi yang Maju, Ramah, Aman dan Nyaman	Persentase sarana prasarana perhubungan yang tersedia dan dikelola di perkotaan	84%
					Persentase tersedianya angkutan umum yang layak yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan kota	44%
Melanjutkan percepatan pembangunan di daerah hinterland untuk pemerataan dan sebagai penopang perekonomian Kota Batam	Terwujudnya Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Memperluas Akses Hinterland	Meningkatnya konektivitas transportasi di hinterland	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur dan Transportasi Perhubungan di wilayah hinterland		Persentase pemenuhan sarana dan prasarana perhubungan di wilayah hinterland	91%
				Tersedianya sarana dan prasarana transportasi di wilayah hinterland	Persentase sarana dan prasarana perhubungan yang tersedia dan dikelola di wilayah hinterland	89%
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Responsif, Efektif dan Efisien berbasis teknologi informasi dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.	Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang profesional, akuntabel, transparan dan mengayomi		Mewujudkan dan meningkatkan sumber daya manusia perhubungan yang memadai secara kualitas dan kuantitas			
				Tersedianya Aparatur yang profesional dan handal	Persentase Pelayanan Administrasi, sarana dan Prasarana Perkantoran yang terpenuhi	100%

3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN RENJA DINAS PERHUBUNGAN

Program dan Kegiatan Dinas Perhubungan Tahun 2023 mengacu pada Permendagri No. 90 Tahun 2019 yang direncanakan berjumlah 3 (tiga) Program Perangkat Daerah, 15 (lima belas) Kegiatan dan 33 Sub Kegiatan, yang terdiri dari :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, terdiri dari :
 - 1.1. Kegiatan Administrasi Keuangan
 - 1.1.1. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - 1.1.2. Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
 - 1.2. Kegiatan Administrasi kepegawaian Perangkat
 - 1.2.1. Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
 - 1.2.2. Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
 - 1.3. Kegiatan Administrasi Umum
 - 1.3.1. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - 1.3.2. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 1.3.3. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - 1.3.4. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - 1.3.5. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - 1.4. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1.4.1. Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - 1.4.2. Sub Kegiatan Pengadaan Mebeleur
 - 1.4.3. Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - 1.4.4. Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

- 1.5. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1.5.1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 1.5.2. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 - 1.6. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1.6.1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - 1.6.2. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - 1.6.3. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 - 1.7. Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD
 - 1.7.1. Sub Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
2. Program penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), terdiri dari :
- 2.1. Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
 - 2.1.1. Sub Kegiatan Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
 - 2.1.2. Sub Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
 - 2.1.3. Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan
 - 2.1.4. Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan
 - 2.2. Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir
 - 2.2.1. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota

- 2.3. Kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
 - 2.3.1. Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
 - 2.3.2. Sub Kegiatan Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
 - 2.3.3. Sub Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
- 2.4. Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
 - 2.4.1. Sub Kegiatan Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas
- 2.5. Kegiatan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan
 - 2.5.1. Sub Kegiatan Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota
- 2.6. Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - 2.6.1. Sub Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
3. Program Pengelolaan Pelayaran, terdiri dari :
 - 3.1. Kegiatan Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak Pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota Dan/Atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota
 - 3.1.1. Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak Pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota dalam Daerah Kabupaten/Kota

- 3.2. Kegiatan Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal
 - 3.2.1. Sub Kegiatan Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal
 - 3.2.2. Sub Kegiatan Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal

TABEL III.3.1
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2024
DINAS PERHUBUNGAN KOTA BATAM

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2023				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Juta Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Juta Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Tersedianya administrasi perkantoran yang menunjang tugas pokok dan fungsi perangkat daerah		100%	27.494.091.410,00			100%	29.730.706.368,00
1	KEGIATAN Administrasi Keuangan	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi	Kota Batam	100%	13.409.387.510,00	APBD		100%	13.197.719.756,00
2	KEGIATAN Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terlaksana	Kota Batam	100%	265.224.000,00			100%	-
3	KEGIATAN Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Batam	100%	259.861.300,00	APBD		100%	254.916.200,00
4	KEGIATAN Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi	Kota Batam	100%	1.198.126.400,00			100%	364.319.012,00
5	KEGIATAN Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kebutuhan jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	Kota Batam	100%	2.717.737.400,00	APBD		100%	2.665.671.400,00
6	KEGIATAN Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang layak fungsi	Kota Batam	100%	685.560.000,00	APBD		100%	748.080.000,00
7	KEGIATAN Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Pelayanan BLUD yang difasilitasi sesuai ketentuan	Kota Batam	90%	8.958.194.800,00	BLUD		100%	12.500.000.000,00

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2023				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Juta Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Juta Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
II.	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Sarana dan Prasarana Perhubungan yang terbangun		71%	29.460.332.150,00			81%	36.077.042.000,00
		Jumlah Sarana dan Prasarana Perhubungan yang terbangun		3.698 Unit				4.199 Unit	
		Jumlah Jukir yang melaksanakan transaksi Non Tunai		100 Orang Jukir				200 Orang Jukir	
		Persentase Kendaraan Wajib Uji yang Lulus Uji		75%				78%	
		Persentase tingkat pelayanan Operasional Bus Trans Batam		33%				41%	
8	KEGIATAN Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Persentase Dokumen Perencanaan Bidang Perhubungan yang disusun	Kota Batam	-	0,00	APBD		-	-
6	KEGIATAN Penyediaan Perengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Perengkapan Jalan yang dibangun setiap tahunnya	Kota Batam	100%	4.948.065.500,00	APBD		100%	2.892.711.700,00
9	KEGIATAN Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Persentase Titik Parkir yang dikelola	Kota Batam	88%	2.164.093.100,00	APBD		88%	10.840.000.000,00
10	KEGIATAN Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase Operasional Pelayanan PKB	Kota Batam	64%	693.239.000,00	APBD		64%	740.523.000,00
11	KEGIATAN Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalulintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Ketersediaan APILL di Persimpangan Jalan Kota	Kota Batam	75%	7.606.382.300,00	APBD		85%	6.128.338.300,00
12	KEGIATAN Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Persentase Pelaksanaan Operasi Terpadu Pengamanan Penertiban Lalu Lintas selama 1 tahun	Kota Batam	100%	264.000.000,00	APBD		100%	275.469.000,00
13	KEGIATAN Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan Operasional Bus Trans Batam (Koridor)	Kota Batam	90%	13.784.552.250,00	APBD		90%	15.200.000.000,00

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2023				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Juta Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Juta Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III.	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Tingkat aksesibilitas masyarakat terhadap transportasi laut		49%	7.859.623.550,00			49%	8.877.016.820,00
14	KEGIATAN Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak Pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota Dan/Atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota	Persentase pulau yang terlayani oleh transportasi laut	Kota Batam	67%	1.706.129.800,00			100%	1.600.000.000,00
15	KEGIATAN Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Persentase prasarana perhubungan laut yang dikelola dalam kondisi baik	Kota Batam	100%	6.153.493.750,00			100%	7.277.016.820,00
					64.814.047.110,00				74.684.765.188,00

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah tahun 2023 memuat program, kegiatan dan sub kegiatan serta pagu indikatif yang dirancang untuk mendukung terwujudnya capaian Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Batam untuk mendukung prioritas pembangunan daerah, dan prioritas perangkat daerah maupun untuk pemenuhan pelayanan Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintah daerah dan sebagai acuan bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran.

Penyusunan kegiatan harus dilakukan secara efektif dan efisien guna memanfaatkan dana APBD dalam memenuhi kepentingan dan kebutuhan masyarakat dilakukan dengan memanfaatkan forum perencanaan, rapat koordinasi maupun menjaring aspirasi masyarakat.

Monitoring dan evaluasi juga harus menjadi kegiatan yang tak terpisahkan dari keseluruhan proses pembangunan agar diperoleh hasil yang maksimal dalam mewujudkan perencanaan pembangunan tahap berikutnya.

Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Perhubungan Tahun 2023 adalah sebesar Rp.64.814.047.110,00 yang tersebar di 3 Program 15 kegiatan dan 33 Sub Kegiatan dengan komposisi dapat dilihat pada Tabel IV-1 yang diambil dari aplikasi SIPD berikut ini:

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Batam
Tahun 2023**

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif					
										Nasional					Daerah			
2						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												
2	15						64,814,047,110						64,814,047,110					
2	15	1					100 %		100 %	100 %	27,494,091,410			100 %	27,493,951,610			
2	15	1	02.02							100 %	13,409,387,510			100 %	13,374,218,010			
2	15	1	02.02	1						73 Orang/ bulan	13,243,067,510	Kota Batam, Batam Kota, Sukajadi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		ASN Dinas Perhubungan	73 Orang/bu lan	13,207,898,010	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	1	02.02	3						32 Dokumen	166,320,000	Kota Batam, Batam Kota, Sukajadi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		ASN Dinas Perhubungan	32 Dokumen	166,320,000	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	1	02.05							100 %	265,224,000					100 %	265,224,000	
2	15	1	02.05	2						172 Paket	127,036,000	Kota Batam, Batam Kota, Sukajadi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		ASN dan THL di Lingkungan Dinas Perhubungan	172 Paket	127,036,000	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	1	02.05	9						10 Orang	138,188,000	Kota Batam, Batam Kota, Sukajadi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		ASN dan THL di Lingkungan Dinas Perhubungan	10 Orang	138,188,000	DINAS PERHUBUNGAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 15 1 02.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%		%	100 %	259,861,300						100 %	285,689,300	
2 15 1 02.06 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	8,366,000	Kota Batam, Batam Kota, Sukajadi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN dan THL Dinas Perhubungan	1 Paket	8,366,000	DINAS PERHUBUNGAN
2 15 1 02.06 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	83,143,500	Kota Batam, Batam Kota, Sukajadi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN dan THL Dinas Perhubungan	5 Paket	84,931,500	DINAS PERHUBUNGAN
2 15 1 02.06 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	19,100,000	Kota Batam, Batam Kota, Sukajadi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN dan THL Dinas Perhubungan	2 Paket	44,100,000	DINAS PERHUBUNGAN
2 15 1 02.06 5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan				1 Paket	24,486,800	Kota Batam, Batam Kota, Sukajadi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN dan THL Dinas Perhubungan	1 Paket	27,576,800	DINAS PERHUBUNGAN
2 15 1 02.06 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				38 Laporan	124,765,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN dan THL Dinas Perhubungan	38 Laporan	120,715,000	DINAS PERHUBUNGAN
2 15 1 02.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase kebutuhan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang terpenuhi	%		%	100 %	1,198,126,400						100 %	1,207,326,400	
2 15 1 02.07 2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				2 Unit	737,480,000	Kota Batam, Batam Kota, Sukajadi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Barang Milik Daerah	2 Unit	737,480,000	DINAS PERHUBUNGAN
2 15 1 02.07 5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				22 Unit	103,430,000	Kota Batam, Batam Kota, Sukajadi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Barang Milik Daerah	22 Unit	112,630,000	DINAS PERHUBUNGAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif						
										Nasional					Daerah				
2	15	1	02.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				48 Unit	357,216,400	Kota Batam, Batam Kota, Sukajadi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Barang Milik Daerah	48 Unit	357,216,400	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	1	02.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi	%	%	100%	2,717,737,400							100 %	2,717,737,400	
2	15	1	02.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				4 Laporan	805,695,000	Kota Batam, Batam Kota, Sukajadi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Perhubungan	4 Laporan	805,695,000	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	1	02.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	1,912,042,400	Kota Batam, Batam Kota, Sukajadi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Perhubungan	12 Laporan	1,912,042,400	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	1	02.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang layak fungsi	%	%	100 %	685,560,000							100 %	685,560,000	
2	15	1	02.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				99 Unit	631,630,000	Kota Batam, Batam Kota, Sukajadi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Barang Milik Daerah di lingkungan Dinas Perhubungan	99 Unit	631,630,000	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	1	02.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				6 Unit	51,530,000	Kota Batam, Batam Kota, Sukajadi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Barang Milik Daerah di lingkungan Dinas Perhubungan	6 Unit	51,530,000	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	1	02.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi				1 Unit	2,400,000	Kota Batam, Batam Kota, Sukajadi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Barang Milik Daerah di lingkungan Dinas Perhubungan	1 Unit	2,400,000	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	1	02.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Pelayanan BLUD	%	%	100 %	8,958,194,800							100 %	8,958,196,500	
2	15	1	02.10	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	8,958,194,800	Kota Batam, Batam Kota, Sukajadi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Unit Pelayanan Teknis (Unit Kerja)	1 Unit Kerja	8,958,196,500	DINAS PERHUBUNGAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
										Nasional	Daerah					
2	15	2			%	100 %	29,460,332,150						100 %	30,455,033,850		
2	15	2	02.02		%	100 %	4,948,065,500						100 %	5,942,765,500		
2	15	2	02.02	1	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun	4 Unit	891,824,900	Kota Batam, Batam Kota, Sukajadi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan.	Sarana dan prasarana perhubungan	4 Unit	891,824,900	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	2	02.02	2	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	1. Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia 2. Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota (Jalur Sepeda)	214 unit 7.1 km	3,306,499,600	Kota Batam, Batam Kota, Sukajadi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan.	Sarana dan prasarana perhubungan	214 unit 7.1 km	4,301,199,600	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	2	02.02	3	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	16 Unit	396,070,000	Kota Batam, Batam Kota, Sukajadi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan.	Sarana dan prasarana perhubungan	16 Unit	396,070,000	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	2	02.02	4	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	125 Unit	353,671,000	Kota Batam, Batam Kota, Sukajadi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan.	Sarana dan prasarana perhubungan	125 Unit	353,671,000	DINAS PERHUBUNGAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
										Nasional	Daerah						
2	15	2	02.04				88 %	2,164,093,100						88 %	2,164,093,100		
2	15	2	02.04	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota		628 Laporan	2,164,093,100	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan.	Junu Parkir	628 Laporan	2,164,093,100	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	2	02.05				64 %	693,239,000						64 %	693,239,000		
2	15	2	02.05	1	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia		11 Unit	51,739,000	Kota Batam, Batam Kota, Sukajadi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan.	Kendaraan angkutan orang dan barang	11 Unit	51,739,000	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	2	02.05	4	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		10000 Dokumen	257,500,000	Kota Batam, Batam Kota, Sukajadi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan.	Kendaraan angkutan orang dan barang	10000 Dokumen	257,500,000	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	2	02.05	7	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara		3 Unit	384,000,000	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan.	Kendaraan angkutan orang dan barang	3 Unit	384,000,000	DINAS PERHUBUNGAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 15 2 02.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan	Persentase ketersediaan APILL di persimpangan jalan kota	%		%	75 %	7,606,382,300						75 %	7,606,382,300	
2 15 2 02.06 2	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	1. Jumlah Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas (Pembangunan APILL)				2 Unit	7,606,382,300	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan.	Sarana dan prasarana keselamatan jalan	2 Unit	7,606,382,300	DINAS PERHUBUNGAN
		2. Jumlah Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas (Marka dan Pita Penggaduh)				2935 M2							2935 M2		
		Jumlah Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas				0 Unit								0 Unit	
2 15 2 02.08	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	persentase pelaksanaan operasi terpadu pengamanan penertiban lalu lintas	%		%	100 %	264,000,000						100 %	264,000,000	
2 15 2 02.08 2	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor				60 Laporan	264,000,000	Kota Batam, Batam Kota, Sukajadi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan.	Kendaraan angkutan orang dan barang	60 Laporan	264,000,000	DINAS PERHUBUNGAN

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
										Nasional	Daerah					
2	15	2	02.09				90 %	13,784,552,250						90 %	13,784,553,950	
2	15	2	02.09	1	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan operasional Bus Trans Batam (Koridor)										
							50 Unit	13,784,552,250	Kota Batam, Batam Kota, Sukajadi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan.	Masyarakat Kota Batam pengguna Bus Trans Batam	50 Unit	13,784,553,950	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	3			PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Tingkat aksesibilitas masyarakat terhadap transportasi laut	%							49 %	6,865,061,650	
2	15	3	02.06		Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota	Persentasi pulau yang terlayani oleh transportasi laut	%							67 %	1,706,129,800	
2	15	3	02.06	2	Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Disetujuinya Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota dalam Daerah Kabupaten/Kota								2 Laporan	1,706,129,800	DINAS PERHUBUNGAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
										Nasional	Daerah					
2	15	3	02.12			100 %	6,153,493,750						100 %	5,158,931,850		
						67 %							67 %			
2	15	3	02.12	2			2 Unit	4,677,944,750	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangk n Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	05. Percepatan Pembangunan Kawasan Hinterland	Masyarakat Hinterland	2 Unit	3,679,783,950	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	3	02.12	3			6 Unit	1,475,549,000	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangk n Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	05. Percepatan Pembangunan Kawasan Hinterland	Masyarakat Hinterland	6 Unit	1,479,147,900	DINAS PERHUBUNGAN

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kota Batam Tahun 2023 ini merupakan rencana kerja tahunan dalam menunjang tercapainya Visi dan Misi Pemerintah Kota Batam serta target dan sasaran pembangunan yang dioperasionalkan melalui Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Kota Batam Tahun 2023.

Rencana kerja yang dibuat merupakan rekapitulasi dan/atau rangkuman dari rencana kerja serupa yang disusun oleh Bidang, UPTD dan Sekretariat terkait dilingkungan Dinas Perhubungan Kota Batam sesuai tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Batam yang didalam setiap Bidang, UPTD dan Sekretariat Dinas Perhubungan memiliki tugas menyusun program kerja Bidang, UPTD dan Sekretariat, sehingga diperoleh gambaran dan deskripsi yang berkesinambungan dan berstruktur sebagai perwujudan perencanaan partisipatif.

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kota Batam sebenarnya lebih banyak kegiatan yang cenderung sama dari tahun ke tahun, namun banyak juga kegiatan strategis yang tidak dapat dilaksanakan karena ketidakcukupan dana sehingga indikator program tidak dapat tercapai.

Akhir kata kami menyadari penyusunan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kota Batam Tahun 2023 ini masih banyak ketidaksempurnaan, oleh karena itu kami mengharapkan masukan dan saran yang konstruktif demi penyempurnaan dan dapat bermanfaat dalam menunjang program kegiatan Dinas Perhubungan Kota Batam kedepannya.



**PEMERINTAH KOTA BATAM
DINAS PERHUBUNGAN**

Jl. Jenderal Sudirman No. 3 Telp. (0778) 459503 Fax. (0778) 452826
BATAM

Kode Pos : 29433

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA BATAM

Nomor : 1684/PR.01.03/XII/2021

TENTANG

**TIM PENYUSUNAN RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN ANGGARAN 2023
DAN PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN ANGGARAN 2022
DINAS PERHUBUNGAN KOTA BATAM**

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA BATAM,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kota Batam Tahun 2021-2026, perlu disusun dokumen Rencana Kerja Dinas Perhubungan Tahun 2023 dan Perubahan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Tahun 2022;
- b. bahwa apabila dalam pelaksanaan Rencana Kerja dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan maka Dinas Perhubungan diwajibkan untuk menyusun Perubahan Rencana Kerja setiap tahunnya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Tim Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun Anggaran 2023 dan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun Anggaran 2022 Dinas Perhubungan Kota Batam dengan keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kota Batam.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota

Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4237);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana terakhir dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 53 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2016 Nomor 53, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 108).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Tim Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun Anggaran 2023 dan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun Anggaran 2022 Dinas Perhubungan Kota Batam, dengan nama-nama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum Pertama mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Mengumpulkan data dan informasi sebagai bahan penyusunan dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun Anggaran 2023 dan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun Anggaran 2022;
 - b. Menyusun dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun Anggaran 2023 dan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun Anggaran 2022 tahapan dan tata cara yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Batam
Pada tanggal 16 Desember 2021

KEPALA DINAS


SAKIM, S. Sos., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19681021 199010 1 001

NO	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
I.	KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA BATAM	KETUA TIM
II.	SEKRETARIS DINAS PERHUBUNGAN KOTA BATAM	SEKRETARIS TIM
III.	KEPALA BIDANG LALU LINTAS	KETUA POKJAI BIDANG PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
III.1.	KEPALA SEKSI MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS	ANGGOTA
III.2.	KEPALA SEKSI KESELAMATAN LALU LINTAS	ANGGOTA
III.3.	KEPALA SEKSI PENGAWASAN DAN PENERTIBAN LALU LINTAS	ANGGOTA
III.4.	KA. UPTD PELAYANAN JASA TRANSPORTASI	KOORDINATOR
III.5.	KA. TU UPTD PELAYANAN JASA TRANSPORTASI	ANGGOTA
III.6.	STAF BIDANG LALU LINTAS	ANGGOTA
III.7.	STAF UPTD PELAYANAN JASA TRANSPORTASI	ANGGOTA
IV.	KEPALA BIDANG LAUT	KETUA POKJA II BIDANG EVALUASI
IV.1.	KEPALA SEKSI PENUNJANG KESELAMATAN PELAYARAN	ANGGOTA
IV.2.	KEPALA SEKSI KEPELABUHANAN	ANGGOTA
IV.3.	KEPALA SEKSI LALU LINTAS ANGKUTAN LAUT	ANGGOTA
IV.4.	KASUBAG KEUANGAN	ANGGOTA
IV.5.	STAF BIDANG LAUT	ANGGOTA
V.	KEPALA BIDANG ANGKUTAN JALAN	KETUA POKJA III BIDANG STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
V.1.	KEPALA SEKSI ANGKUTAN BARANG	ANGGOTA
V.2.	KEPALA SEKSI ANGKUTAN ORANG	ANGGOTA
V.3.	KEPALA SEKSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR	ANGGOTA
V.4.	KEPALA UPTD PELAYANAN PARKIR	ANGGOTA
V.5.	KEPALA TU UPTD PELAYANAN PARKIR	ANGGOTA
V.6.	STAF ANGKUTAN JALAN	ANGGOTA
V.7.	STAF UPTD PELAYANAN PARKIR	ANGGOTA

NO	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
VI.	KEPALA BIDANG PRASARANA PERHUBUNGAN	KETUA POKJA IV BIDANG RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
VI.1.	KEPALA SEKSI PRASARANA ANGKUTAN LAUT	ANGGOTA
VI.2.	KEPALA SEKSI PERENCANAAN TEKNIS	ANGGOTA
VI.3.	KEPALA SEKSI PRASARANA LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN	ANGGOTA
VI.4.	KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	ANGGOTA
VI.5.	KASUBBAG PERENCANAAN PROGRAM	ANGGOTA
VI.6.	STAF BIDANG PRASARANA PERHUBUNGAN	ANGGOTA
VI.7.	STAF SEKRETARIAT DINAS PERHUBUNGAN	ANGGOTA

KEPALA DINAS



SALIM, S.Sos., M.Si.
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19681021 199010 1 001